ISBN 978-979-1340-81-6

PROSIDING

Musyawarah Kerja APMAPI dan Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan 2014

"Revolusi Mental Pemimpin dan Manajer Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Kontemporer Menuju Indonesia Emas"

Gorontalo, 28 - 30 November 2014

ISBN: 978-979-1240-81-6

Prosiding

Musyawarah Kerja APMAPI dan Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan 2014

"Revolusi Mental Pemimpin dan Manajer Pendidikan dalam Implemetasi Kebijakan Pendidikan Kontemporer Menuju Indonesia Emas"

Diselenggarakan oleh:

JURUSAN S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Kerjasama Dengan

PROGRAM STUDI S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Diterbitkan oleh:
UNG Press
2014

ISBN : 978-979-1240-81-6

Ketua Penyunting : Ansar

Penyunting Pelaksana : Arwildayanto
Abd. Rahmat
Isnanto
Asrin

Penyunting Ahli : Abd. Kadim Masaong
Yoseph Paramata
Wenny Hulukati

Pelaksana : Warni T. Sumar
Novawati Kansil

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SAMBUTAN KETUA APMAPI

Puji syukur kita panjatkan ke hadlirat Allah Swt atas segala rakhmat dan karuniaNya, sehingga Musyawarah Kerja Musker) Asosiasi Program Studi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia (APMAPI) dan Temu Ilmiah Nasional tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Kegiatan Musker dan Temu Ilmiah Nasional APMAPI ini merupakan salah satu proram kerja yang dirancang sejak Deklarasi APMAPI pada bulan Maret 2014 di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Musker dan Temilnas APMAPI ini merupakan forum yang mempertemukan pemikiran-pemikiran pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu akademik program studi Administrasi dan atau Manajemen Pendidikan pada tingkat sarjana, magister dan doktor di Indonesia.

Pada kegiatan Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS) dipresentasikan berbagai pemikiran para ahli dalam bidang kajian administrasi/manajemen pendidikan, baik kajian yang berbasis riset maupun pengembangan pemikiran berbasis kajian literatur maupun kebijakan pendidikan kontemporer di Indonesia. Pemikiran para akhli tersebut ada yang disajikan secara langsung dalam forum Temilnas, ada juga yang disajikan dalam dokumen prosiding Temilnas, karena keterbatasan waktu untuk disajikan secara langsung.

Prosiding merupakan dokumen tertulis yang menyajikan pemikiran-pemikiran para ahli dari berbagai Program Studi Administrasi/Manajemen Pendidikan yang mengirimkan artikelnya kepada Panitia Pelaksana Temilnas APMAPI tahun 2014 di Universitas Negeri Gorontalo. Prosiding ini diterbitkan oleh Panitia, karena tidak semua artikel yang dikirim para penyaji dapat disajikan secara langsung pada forum Temilnas, dan tidak semua pengirim artikel dapat hadir secara fisik dalam forum Temilnas APMAPI 2014. Melalui prosiding ini, diharapkan para dosen dan pengamat perkembangan bidang kajian administrasi/manajemen pendidkan di Indonesia dapat memanfaatkan pemikiran-pemikiran yang dimuat dalam prosiding ini untuk berbagai kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran ataupun yang lainnya sesuai dengan posisi masing-masing pembaca.

Kepada para pengirim artikel dan penyaji, kami atas nama Panitia Pelaksana Temilnas dan Pengurus APMAPI menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih ayng tidak terhingga atas partisipasinya dalam mensukseskan Temilnas APMAPI tahun 2014. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian prosiding ini. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi semua yang terkait dengan pengembangan bidang kajian administrasi/ manajemen pendidikan di Indonesia.

Gorontalo, 28 November 2014
Ketua Umum Pengurus APMAPI,

dto

Prof. UDIN SYAEFUDIN SAUD, Ph.D
NIP. 19530612 198103 1003

SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

...secara gamblang dan berani UNG telah menawarkan diri
sebagai *"alam besar"*, yang siap membangunkan mentalitas baru yang massif".
(Syamsu Qamar Badu, 2010)

Asosiasi Program Studi Manajemen/ Administrasi Pendidikan (APMAPI) sebagai candradimuka ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, di tengah gemuruh pembangunan lokal dan nasional yang sedang berlangsung saat ini, khusunya bidang manajemen/administrasi pendidikan. Untuk itulah, APMAPI merupakan bagian dari semangat Tridharma Perguruan Tinggi, bertanggung jawab mengemban *"amanah sosial, ilmiah, profesional dan moril"*, hadir di tengah para ilmuan dan praktisi manajemen/administrasi pendidikan di Indonesia. APMAPI dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu penelitian dan pengembangan manajemen pendidikan nasional pada perguruan tinggi dan praksis pengelolaan lembaga kependidikan baik secara mikro dan makro di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Musyawarah kerja nasional dan Temu Ilmiah APMAPI di Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo pada tahun ini dapat menjadi sumbangsih kami dalam memajukan dunia pendidikan nasional. APMAPI hadir ini di tengah resonansi kritik dan harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi. Selaras dengan misi APMAPI untuk memperkuat program studi Manajemen/Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Tinggi di seluruh Indoensia agar proaktif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, demikian juga saya sebagai pimpinan, sejak awal kepemimpinan, saya berupaya untuk mengembangkan budaya akademik *(academic culture), iklim akademik (atmosfer academic)* di kalangan sivitas akademika UNG agar menjadi bagian yang melekat dalam tradisi intelektualitas di tengah masyarakat Gorontalo dan Indonesia umumnya..

APMAPI hadir untuk memperkuat jaringan Prodi Manajemen/ Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Tinggi dalam rangka memperbaiki mutu tata kelolala, dosen, pembelajan, kualitas lulusan di tengah sorotan masyarakat luas terhadap mutu pendidikan nasional di tengah persainagan global. APMAPI berupaya hadir memperkuat posisi program studi yang berapiliasi dengan APMAPI agar dapat menumbuhkan gairah meneliti dan menulis yang merupakan tradisi mencipta untuk meningkatkan dedikasi ilmiah para akademisi bidangnya masing-masing.

Bagi yang menekuni bidang kependidikan APMAPI hadir di tengah masyarakat manajajemen pendidikan dan sekitarnya, lebih setengah abad yang lalu. Fakultas Ilmu Pendidikan telah hadir untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan bagi dunia pendidikan di Gorontalo dan sekitarnya. APMAPI harus hadir sebagai "dapur besar" pengembangan program studi manajemen/administrasi pendidikan. Hal ini tentu terwujud, manakala para sivitas APMAPI menggembangkan amanah sosial, ilmiah dan moril untuk memajukan dunia pendidikan dengan

bersikap proaktif atas penelitian dan eksperimen pendidikan yang lebih bermutu bagi masya luas.

Pada dekade berikutnya APMAPI menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pengemba mutu pendidikan. Bahkan di tengah kritik dan tantangan mutu pendidikan saat ini peran stra lembaga ini untuk terus proaktif dalam peningkatan mutu guru pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan menengah, guru bimbingan dan konseling, tata usaha sekolah, pengawas, ke sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. APMAPI terus memposisikan diri sebagai lokom perbaikan dan pembaharuan kependidikan secara utuh agar pendidikan konsisiten untuk melahir SDM yang cerdas dan berkarakter untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kehadiran buku panduan dan Proceding APMAPI 2014 ini menunjukkan bahwa semangat gairah para ahli manajemen pendidikan untuk meneliti dan menulis terus meningkat, sehin terbangun suasana check and balance dunia praktis dan akademis dalam mengembangan ilmu praktik manajemen pendidikan di Indonesia. Ini membuktikan bahwa para dosen sanggup un mencipta karya-karya ilmiah untuk diwariskan pada para insane pendidikan dan generasi berikutn Buku ini sebagai upaya untuk menyelenggarakan gagasan dan ide inovatif dalam pengembang ilmu kependidikan dan pratik kependidikan. Buku panduan dan prosiding ini untuk mengas intelektualitas antara praktisi dan pemerhati pendidikan.

Gorontalo, 28 November 2014
Rektor UNG

dto

Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.
NIP. 196006031986031003

SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) III Asosiasi Prodi Manajemen/ Administrasi Pendidikan Indonesia (APMAPI) merupakan forum musyawarah tahunan untuk membahas dan mendiskusikan berbagai hal (*common problems*) yang dipandang penting agar masing-masing anggota saling belajar dan membagi pengalamannya untuk meningkatkan mutu organisasi. Disamping itu juga diselenggarakan Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan 2014 yang merupakan wadah keilmuan dan media diskusi kolegial yang diselenggarakan para penggiat disiplin ilmu manajemen/ administrasi pendidikan di Indonesia.

Tentunya maksud dan tujuan dari Muskernas III dan Temilnas MP 2014 ini sangat strategis dalam melihat berbagai persoalan pendidikan nasional dan isu-isu kontemporer yang menjadi bagian dari program unggulan pemerintah. Untuk itu, saya berharap kiranya kegiatan ini dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini, utamanya kontribusi dalam bidang pengelolaan pendidikan.

Terakhir harapan saya kiranya musyawarah kerja nasional dan temu ilmiah Manajemen Pendidikan ini jangan hanya berahir pada musyawarah ini saja, namun dapat diterapkan dalam tugas keseharian, terutamanya dalam memimpin lembaga pendidikan.

Demikian kata sambutan ini disampaikan dan kepada segenap panitia disampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi telah bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Sekaligus kepada peserta kami menyampaikan ucapan selamat datang di Gorontalo, selama mengikuti Muskernas III APMAPI dan Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan tahun 2014. Semoga menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang berharga bagi kemajuan dunia pendidikan kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Gorontalo, 28 November 2014
Dekan FIP UNG

dto

Dr. Wenny Hulukati, M.Pd
NIP. 195709181985032001

SAMBUTAN PANITIA PELAKSANA
MUKERNAS III APMAPI DAN TEMILNAS MP 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan Rahmat-Nyalah kita dapat melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional III APMAPI dan Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan 2014 yang berlangsung pada tanggal 28 – 30 November 2014 di Gorontalo, yang tahun ini dipercayakan kepada Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG bekerjasama dengan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana sebagai tuan rumah.

Muskernas III APMAPI dan Temilnas MP 2014 ini merupakan pertemuan yang istimewa mengingat tahun ini pula kurikulum 2013 kembali dipertanyatakan oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah setelah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya. Sekaligus tahun ini juga terjadi moment penting. Dimana terjadi pergantian kepemimpinan nasional, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah memiliki beberapa program unggulan, diantara revolusi mental pegawai negeri sipil, peninjauan ulang kurikulum 2013. Kondisi bangsa Indonesia saat ini menjadi tema sentral kegiatan Muskernas III APMAPI dan Temilnas MP 2014 dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

Muskernas III APMAPI dan Temilnas MP 2014 berupaya dilaksanakan dengan baik, untuk itu diperlukan penerbitan buku panduan kegiatan, dan prosiding. Buku Panduan berisikan rencana dan scenario kegiatan sedangkan Prosiding berisikan artikel ilmiah hasil penelitian, pengabdian pada masyarakat serta pemikiran ilmiah lainnya.

Terakhir panitia menyadari bahwa kegiatan ini tentu tidak sempurna sesuai dengan harapan kita semua, untuk itu, dalam kesempatan ini kami sebagai panitia menyampaikan permohonan maaf. Sekaligus memohon saran dan masukan dari peserta dan pembaca untuk kesuksesan yang lebih bermakna

Wassalam,

Gorontalo, 28 November 2014
Panitia Pelaksana,

dto

Dr. ARWILDAYANTO, M.Pd
NIP 19750915 200812 1 001

DAFTAR ISI

...a Belajar Mahasiswa (Korelasi Antara Budaya Belajar Dengan Prestasi Belajar ...siswa KIMP FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
...m Asy'ari dan Muarif Sam ..... 1 – 8

...kan Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan ...dikan
... Tune Sumar ..... 9 – 17

...gan Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kompetensi Profesional Guru di SMK ... 7 Padang
...wati Dan Yusof Bin Boon ..... 18 – 24

...h Iklim Organisasi Sekolah, Motivasi Kerja, dan Komitmen Kerja Terhadap ...zational Citizenship Behavior (OCB) Guru
...mad Naim ..... 25 – 34

... Indonesia Emas 2045: Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia ... Manajemen Lingkungan Pendidikan
... Sari ..... 35 – 43

...gan Kultur Akademik dan Pengelolaan Konflik dengan Motivasi Berprestasi ...swa
... Kadim Masaong dan Ramlah Umar ..... 44 – 51

... Leadership: An Effective Principal Leadership In The Changing Nature Of ... Management
... Haris ..... 52 – 62

...-Nilai Kepemimpinan Dalam Budaya Madura
... Yusuf Sobri ..... 63 – 72

...apan Pendekatan "*Lesson Study*" Untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Praktik ...ar Pada Mahasiswa Program Studi PGSD FKIP Universitas Jember
... Sholhon Masyhud ..... 73 – 81

...katan Pelayanan Kampus Inklusif Bagi Mahasiswa Disabilitas di UNESA Surabaya
...ardo ..... 82 – 90

...entukan Budaya Disiplin Di SMK Negeri 18 Jakarta 1
... Musfah dan Mariatul Kiftiah ..... 91 – 99

...kan Perencanaan, Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Melalui Kineja ...erial Kepala Sekolah
... Triwiyanto ..... 100 – 107

...apan Berargumen Sebagai Pilar Pokok Revolusi Mental
...g Suteng Sulasmono ..... 108 – 116

Pengaruh Kepribadian dan Persepsi Terhadap Pekerjaan Terhadap *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) Guru SMA Negeri Se-Kabupaten Karawang
Neti Karnati dan Ilham Fahmi 117

Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Berdaya Saing
Dedi Mulyasana 123

Pembiayaan dan Kualitas Pendidikan Indonesia
Suryono 131

Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Kinerja Konselor (Guru Pembimbing) di Sekolah
Sugiyo 139

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada Sekolah Dasar
Sugito 146

Penataan Guru Pendidikan Dasar Berbasis Data Pokok Pendidikan
Yovitha Yuliejantiningsih dan *Nurkolis* 153

Pengelolaan Pendidikan Karakter Siswa
Novianty Djafri 162

Pengaruh Sarana Penunjang Akademik, Lingkungan Kerja dan Peduli Mutu Terhadap Kinerja Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo
Yanty K. Manoppo 170

Konstruksi Manajemen Personalia Pendidikan di Sekolah Bermutu
Bajang Asrin dan Arwildayanto 180

Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Baca Tulis Alqur'an Bagi Siswa Smp Negeri Di Kota Gorontalo
Arten H. Mobonggi 189

Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Sebagai Faktor Determinan dalam Mencapai Mutu Pendidikan di Indonesia
Bambang Budi Wiyono 201

Pengaruh Iklim Kerja, Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Se- Kabupaten Bone Bolango
Lili H. Djau 211

Pembangunan Karakter Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Sanusi Uwes 222

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Keterampilan Berkomunikasi Guru
Arifin Suking 228

Membangun Budaya Religius di Sekolah
Wiwik Diah Aryani dan *H.E. Mulyasa* 236

Implementasi Perkuliahan Supervisi Pendidikan Sebagai Matakuliah Berbasis Pengabdian Dalam Menyongsong Akreditasi Sekolah
Sulasminten 244

Pengaruh Budaya Organisasi, Kualitas Layanan, Kepuasan Pengguna Citra Lembaga Pendidikan Islam di Provinsi Gorontalo
Abdurrahman Mala ..... 249 – 254

Penerapan Manajemen Strategik Pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Syiah Kuala
Zat Zahri Harun ..... 255 – 262

Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Dengan Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gorontalo
Sutrisno Dj. Yunus ..... 263 – 270

Pengaruh Motivasi Berprestasi, Komitmen, Keinovatifan Terhadap Kinerja Guru Penelitian Kuantitatif Pada SMA Se-Kota Gorontalo
Yolanda Pateda ..... 271 – 279

Kemitraan Dalam Manajemen Pendidikan Sekolah
Andi Cudai Nur ..... 280 – 284

Motivasi Kerja Guru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kabila Kabupaten Gorontalo
Iman Abdul Razak ..... 285 – 290

Revolusi Mental Pemimpin Pendidikan Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendidikandan Pelatihan Tenaga Kependidikan
Karwanto ..... 291 – 303

Pengelolaan Pemberdayaan Bagi Wanita Nelayan Melalui Pendidikan Keterampilan Fungsional Kreatif di Kota Gorontalo
Abdul Rahmat ..... 304 – 311

Pengembangan Model Evaluasi Diri Sekolah Secara Online
Widiyu Sri Ambar Arum ..... 312 – 322

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo
Yurni Rahman ..... 323 –330

Implikasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Profesionalisme Guru
Dulaicha Ngiu ..... 331 – 339

Inovasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 08 Kota Bengkulu
Aliman Siana ..... 340 – 349

Implementasi Program Paket C di Kabupaten Gorontalo
Mirian Rahman ..... 350 – 357

Evaluasi Kebijakan dan Program Manajemen Berbasis Sekolah Studi di Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Banten.
Hudiyanto ..... 358 – 366

Pemetaan Kebutuhan Lapanagan dan Pemenuhan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Kurikulum Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Mataram
Dudirman Wilian, Wildan, A Wahab Jufri, Nyoman Sridana ..... 367 – 373

Pembinaan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Gunung Talang Solok
Syahril 374

Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pada Mata Kuliah Pembelajaran Sains SD Melalui Pendekatan PAKEM Berintegrasi Pendidikan Karakter di Jurusan PGSD Universitas Negeri Gorontalo
Gamar Abdullah 380

Keinovatifan Pengawas Membina Kreativitas Guru dalam Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Gorontalo
Fadliah 387

Faktor Penawaran dan Permintaan Serta Implikasinya Terhadap Adanya Pekerja Anak (Studi Tentang Perilaku Pekerja Anak di Pasar Sentral Kota Gorontalo)
Meyke Alie 395

Persepsi Mahasiswa Terhadap Fasilitas dan Pelayanan Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo
Muhammad Polinggapo 405

Disiplin Kerja dengan Produktifitas Kerja Tenaga Penunjang Akademik Pada BAAKPSI Universitas Negeri Gorontalo
Meity Mononimbar 414

Penjajagan Pengukuran Wellbeing Guru di Lingkungan Pendidikan Dasar
Laurens Kaluge dan Setiasih 421

Pengelolaan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Pada Pendidikan Menengah di Kab. Gorontalo
Irmawati Duko Ishak 430

Persepsi Guru Tentang Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gunung Talang Solok
Nelfia Adi dan Sulastri 438

Manajemen Pendanaan Pendidikan Dalam Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kasus Pada SD di Salatiga, Ungaran, Semarang, Demak, Kendal dan Purwodadi)
Bambang Ismanto 448

Performansi Kepala Sekolah Dalam Membina Karakter Guru dan Peserta Didik
Sitti Roskina Mas 456

Epistemologi Manajemen Pendidikan Islam
Irawan 464

Analisis Kinerja Sekolah Berdasarkan Implementasi *Total Quality Management* dan Learning Organization di SMK Eks Rsbi Se Jawa Tengah
Welius Purbonuswanto 473

Penerapan Standar Proses Pembelajaran di Sekolah
Astin Lukum 483

nung

..... 374 –

SD Melalui
sitas

..... 380 –

ungan

..... 387 –

Anak

..... 395 –

Negeri

..... 405 –

AKPSI

..... 414 –

..... 421 –

enengah

..... 430 –

ecamatan

..... 438 –

da SD di

..... 448 –

..... 456 –

..... 464 –

n

..... 473 –

..... 483 –

engelolaan Pendidikan di SMP Terbuka (Studi Kasus di SMP Terbuka Kabupaten
orontalo Utara)
ma Lamatenggo ..... 491 – 499

engaruh Budaya Akademik, Kualitas Layanan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas
ahasiswa Program Studi di Perguruan Tinggi Swasta
ny Panai ..... 500 – 508

endekatan Profesionalisme dan Kultural Pada Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013
andiarmo ..... 509 – 516

valuasi Program Pemberdayaan Pengrajin Krawang Sebagai Sarana Peningkatan
enggulan Bersaing di Kabupaten Gorontalo
ny Armin Naway ..... 517 – 528

engaruh Pengetahuan Manajemen, Sikap Kepala Sekolah, dan Efektivitas Penyelenggaraan
DDIRA Terhadap Kinerja Sekolah di Provinsi Gorontalo
ifin Arsyad ..... 529 – 540

evolusi Mental Kepemimpinan Kepala Sekolah (Selayang Pandang Urgensi
epemimpinan Pendidikan)
rmala ..... 541 – 548

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

WARNI TUNE SUMAR
Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo
warnisumar@yahoo.com

ABSTRAK

education decentralization policy, the transfer of authority from the central government local governments is to facilitate the process and the local government autonomy in the educational unit that has the ability to manage and organize quality education and fair. This is largely determined by the strength of an autonomous region, the high budget each obtained from various sources, such as local tax, equalization funds, third-party contributions, and other revenue sources. This implies the application of Law No. 22 of 1999 and Act No. 25 of 1999. The paradigm shift among others, relating to the planning of autonomous regional development programs, including the education sector. Development of educational programs are now more reliant on the principle of democracy, participation, pemberdayaan potential available resources area. For the successful implementation of decentralization there are at least four things that are prepared namely: (1) legislation governing the decentralization of education both regions, provinces, to the level of institutional, (2) development of local capabilities, (3) the establishment of the planning unit responsible for preparing educational planning, (4) the social form of the local community readiness to accept and help create a climate conducive to the implementation of the decentralization of education.

Kata Kunci: *Kebijakan, otonomi daerah, penyelenggaran pendidikan*

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam otonomi daerah adalah membenahi segala kemelut akibat derasnya arus globalisasi. Padahal persoalan akibat hura hara dapat menggulingkan tirani pemerintahan pun belum tuntas, harus pula berkemas dengan segala kemelut derasnya arus globalisasi. Globalisasi yang sering dianggap sebagai pembawa masalah bagi kehidupan bangsa, jika dimanfaatkan dapat senantiasa memberikan manfaat bagi kehidupan.

Dalam era otonomi sebenarnya terbuka peluang besar untuk membangun dunia pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Bupati/Walikota memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas pendidikan sesuai dengan konteks daerahnya. Jadi dalam era otonomi daerah kualitas pendidikan untuk yang akan datang lebih banyak tergantung pada komitmen daerahnya untuk merumuskan visi dan misi daerahnya masing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sector pendidikan dapat memiliki peluamg besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para stakeholder. Manakalah pemerintah daerah memiliki political wil yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan dan sistem perencanaan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai human investment di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu dapat memiliki praksis yang baik dan kualitas pendidikan akan dapat ditegakan. Namun sebaliknya manakala pemerintahan daerah memandang pendidikan tidak penting sehingga visi dan misi pendidikan di daerah itu tidak dirumuskan secara jelas dalam system perencanaan yang baik, maka kemungkinan besar tidak dapat diderivasikan menjadi praksis pendidikan yang solid, jika hal ini terjadi praksis pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara professional. Akhirnya setiap berbicara visi dan misi pada satuan pendidikan berubah menjadi sesuatu yang dipandang mewah. Kondisi seperti ini akan mendorong para praktisi pendidikan di daerah kehilangan

arah dalam menjalankan fungsinya secara professional. Oleh Karena itu di era otonom pendidikan dewasa ini merupakan saat yang menentukan membangun budaya tatakelola

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidika nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisas dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralisti diakui kurang bias mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, sert keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisas pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual da penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu: (1) kebijakan pendidikan nasional sange sentralistik dan serba seragam yang giliranya mengabaikan keseragaman sesuai denga realita kondisi, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah,(2) kebijaka dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorinetasi pada pencapaian targe tertentu, seperti target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah pada potensi peserta didik.

Dengan kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 (dimulai dengan UU Nomor 29 Tahun 1999) tentang pemerintahan daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepemerintah daerah, memungkinkan daerah itu untuk melakukan kreasi inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawah implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.

Disadari bahwa pemberian porsi yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dibidang pendidikn membawah sejumlah implikasi seperti bidang adminitrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan dan sebagainya. Oleh karena itu kesiapan daerah untuk dapat menjalankan peran yang lebih besar menjadi sentral dalam pelaksanaan desentralisai pendidikan. Meskipun desentralisasi pendidikan merupakan sebuah keharusan, namun dalam relaitasnya pelaksanaan desentralisasi pendidikan terkesan satu tindakan yang tergesa-gesa dan tidak siap. Hal ini dapat terlihat diberbagai persoalan yakni sumber daya manusia (SDM) daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, manajemen pendidikan yang belum optimal dan lain sebagainya.

Diantara persoalan yang dihadapai pendidikan di daerah sekarang adalah menyangkut mutu lulusan yang masih rendah, kekurangan guru dan kualifikasinya yang tidak sesuai, ketidak merataan penyelenggaran pendidikan, masalah relevansi, kurikulum dan hal-hal lain sebagainya, ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemahaman dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah tentang pendidikan sangat diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan tersebut. Adapun kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula mendapat perhatian dari sekolah. Dengan demikian sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

PEMBAHASAN

1. Konsep Era Otonomi Daerah

Perkataan otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti hokum atau aturan (Abdurrahman 1987:9). Menurut (Danuredjo 1977) mengemukakan otonomi adalah perundangan sendiri, sedangkan (Koesoemahatmadja 1979:9) mengemukakan otonomi adalah mengatur atau memerintah sendiri. Wajong (1979:16) mengemukakan otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan otonomi daerah adalah kemandirian daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa mengupayakan campur tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah atasanya. Dengan adanya otonomi daerah tersebut bebas untuk mengapresiasikan kemampuan potensi yang dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak dalam mengambil keputusan sehingga mampu berkarya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Otonomi daerah merupakan reformasi politik yang menjanjikan banyak perubahan, setelah memasuki rentang waktu dasawarsa pertama, otonomi daerah telah melahirkan banyak harapan. Tetapi juga banyak tantangan yang muncul kepermukaan seperti persoalan sumber daya tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan, standarisasi kurikulum, bahkan yang utama masalah peraturan dan perundang-undangan pendidikan. Desentralisasi pendidikan menjadi salah satu pilihan pemerintah Indonesia setelah era reformasi. Faktanya menurut penilaian para pakar menunjukan pendidikan nasional masih kurang berhasil dari berbagai factor masukan proses dan keluaran.

2. Kebijakan Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah

Pemberlakuan UU Otonomi daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dengan diserahkanya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia termasuk juga dalam aspek pendidikan.

Pelaksanaan sistem pendidikan juga memerlukan kebijakan untuk perubahan atau peningkatan mutu. Diperlukan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenan dengan proses pembudayaan, dengan begitu eksistensi sekolah sangat strategis dalam kerangka kelangusngan hidup peradaban manusia. Sekolah menjadi pranata social yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk menjadi pelaku dalam proses pembangunan bangsa. Untuk itu peranan pendidikan harus ditingkatkan sejalan dengan semakin besarnya tantangan yang dihadapi oleh setiap sekolah dalam era globalisasi abed ke -21. bahkan dalam era otnomi saat ini seperti: tantangan dalam bidang manajemen berbasis sekolah (MBS), kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan berbasis masyarakat, sertifikasi guru untuk memperdayakan tenaga kependidikan, dan teknologi pembelajaran yang up to date memerlukan kebijakan pendidikan yang akurat dalam era desentralisasi saat ini, dan kebijakan pendidikan yang harus berkelanjutan.

Dengan demikian melihat plus minusnya bagaimanapun desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Disamping tentunya sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menuntut untuk dilaksanakan. Dengan sejumlah kewenangan yang begitu besar tersebut membawah perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan dan berlaku juga dalam penentuan stakeholder didalamnya, jika pada masa sebelum diberlakukan otonomi daerah stakeholder pendidikan sepenuhnya hanya dengan aparat pusat, maka diera otonomi pendidikan sekarang ini peranan stakeholder akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintahan daerah diharapkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan atau monitoring di daerah masing-masin yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan menurut Supriadi (2003:71) mengemukakan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan menjadi empat

kemungkinan yaitu: (1) suatu Negara menganut system pengelolaan pendidik sentralistik tanpa disertai dengan manajemen berbasis sekolah, (2) suatu Neg menganut system pengelolaan pendidikan desentralistik (ketingkat propinsi a kabupaten kota) tetapi tidak diikuti dengan manajemen berbasis sekolah, (3) suatu Neg menganut system pengelolaan pendidikan sentralistik, tetapi pada saat yang sa mengembangkan manajemen berbasis sekolah, (4) suatu Negara menganust syst pengelolaan pendidikan desentralistik dan sekaligus melaksanakan manajemen berba sekolah.

Umiarso (2010:27) mengemukakan otonomi atau desentralisasi pendidik mempunyai dua arti: pertama menata kembali system pendidikan nasional ya sentralistik menuju suatu system menuju yang memberikan kesempatan luas kepa inisiatif masyarakat setempat, kedua otonomi pendidikan bukan berarti melepaskan seg ikatan untuk membangun Negara Kesatuan Repeblik Indonesia, melainkan un memperkuat dasar-dasar pendidikan pada tingkat grass root guna membentuk sua masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan kebinekaan masyarakat. Jadi mak otonomi pendidikan ialah pendidikan dikembalikan kepada stakeholder (masyarakat)

Konsep penyelenggaraan pendidikan yang bersifat desentralisasi dikenal deng Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (*sehoil based management)* yang merupak perubahan pradigma pengelolaan pendidikan yang awalnya bersifat sentralistis men desentralistis. Artinya pengelolaan pendidikan yang semula berpusat pada pemerint pusat mulai dari yang bersifat mikro maupun makro beralih kepengelolaan pendidik pada pola manajemen sekolah di mana sekolah tersebut yang mengelolanya.

3. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari adalah sesua yang tidak dapat dihindari. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi neg yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pusat melainkan lebih berwawas keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif kare kurang mempettimbangkan keagamaan dan kekhasan daerah, disamping itu membaw ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai deng kebutuhan (local), menghambat kreaktivitas, dan menciptkan budaya menunggu petunj dari atas pusat.

Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayak peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapang Desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberiaan kewenangan yang leb besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualit pendidikan. Desentralisasi pendidikan meliputi suatu proses pemberiaan kewenang yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerint pusat ke pemerintah lokal dan pada saat kewenangan yang lebih besar juga diberikan pa tingkat sekolah.

Desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dala penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah ser terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaraan syste pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu dan teknolog Dalam penerapan desentralisasi pendidikan, unsur partisipasi masyarakat merupakan h yang sangat penting. Sebab salah satu keberhasilan desentralisasi pendidikan ya terwujud pada manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah kemampuan sekolah mengaj masyarakat berpartisipasi dalam mendukung terselenggarannya pendidikan. Pih masyarakat yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain: orang t siswa, anggota komite sekolah, masyarakat, tokoh agama serta LSM.

Menurut Hasbullah (2006:14) mengemukakan desentralisasi pendidika merupakan sebuah system manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidika yang menekankan pada kebinekaan. Santoso.s. Hamijoyo (1993:3) ada beberapa hal ya harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan yaitu: (1) pola da pelaksanaan manajemen harus demokratis, (2) pemerdayaan masyarakat harus tuju

(3) peran serta masyarakat bukan pada stakeholder tetapi menjadi sebagaian untuk dalam pengelolaan pendidikan, (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien,efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik, (5) keanekaragaman budaya dan nilai serta norma local harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan nasional.

4. Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Implikasinya dalam Penyelenggaran Pendidikan

Lahirnya kebijakan pemerintah dengan kehadiran UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 1999 dan ditindaklanjuti dengan PP Nomor 25 tahun 2000 serta beberapa PP yang lain sebagai petunjuk teknisnya telah membawah dampak yang cukup besar dalam berbagai aspek pemerintahan dan iklim demokratisasi di Indonesia.

Menurut Mulyasa (2004:23) implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten/kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, perubahan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pada unit-unit kerja di daerah, kepegawaian yang menyangkut perubahan dan pemerdayaan sumber daya manusia yang menekankan pada profesionalisme, serta perubahan-perubahan anggaran pendidikan.

Dalam persepktif dampaknya, Abdul Halim (2001:15) mengemukakan bahwa indikasi keberhasilan otonomi daearah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Keadaan tersebut hanya dapat tercapai apabila lembaga sector public dan birokrasi dengan memperhatikan konsep kinerja program pembangunan yang dilaksanakan.

Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun dapat membawah implikasi yang sangat besar dalam berbagai tatanan pemerintahan baik pusat maupun daerah tak terkecuali dalam hal ini dibidang pendidikan. Mardiasmo (2002:83). Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan pusat ke daerah. Namun dalam penyelenggaraannya banyak mengalami persoalan, meskipun hal ini bukan merupakan alas an orang untuk menyalahkan kebijakan otonomi daerah sebab pada dasarnya lebih banyak tergantung pada kesiapan daerah itu sendiri, terutama menyangkut sumber daya manusia di daerah dan pemahaman orang terhadap otonomi daerah itu sendiri.

Implikasi otonomi daerah bagi desentralisasi pendidikan sangat tergantung pada pembagian kewenangan di bidang pendidikan yang ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jika mengacu pada Undang-undang No 22 tahun 1999 maka kewenangan di sektor pendidikan yang terkait dengan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan nasional secara makro, kebijakan pembinaan dan pemerdayaan sumber daya manusia, serta kebijakan standardisasi nasional akan ditangani oleh pusat, sedangkan yang lainnya akan ditangani oleh daerah.

Masih belum jelas benar interprestasi pelaksanaan desentralisasi dibidang pendidikan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1999. salah satunya tentang status kepegawaian, guru, yakni tetap sebagai PNS nasional atau PNS daerah akan sangat berpengaruh pada alokasi anggaran, yaitu pembiayaan melalui APBN atau APBD. Implikasi lain dari status guru adalah fleksibilitas daerah dan sekolah dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mutasi, pemberhentian serta evaluasi atas kinerja guru.

Dari aspek kurikulum, perlu kejelasan tentang kebijakan perumusan kurikulum, apakah hanya kurikulum inti yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara muatan local yang dalam persentase cukup signifikan diserahkan kepada masing-msaing daerah atau bahkan langsung masing-masing ke sekolah. Saat ini kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh pusat misalnya (kurikulum 2004) dan daerah hanya dapat merancang

bagian kurikulum yang berupa muatan local. Misalnya daerah Gorontalo muatan lok kurikulum ditetapkan pada mata pelajaran bahasa ibu yakni bahasa Gorontalo.

Pertanyaannya apakah arah desentralisasi pendidikan adalah sampai sebera jauh sekolah- sekolah dapat diberi kewenangan yang lebih besar menentukan kebijaka kebijakan tentang organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru, struktur da perencanaan di tingkat sekolah serta sumber-sumber pendanaan sekolah. Desentralisa pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberiaan kewenangan da pendanaan yang lebih besar dari pusat ke daerah, tetapi juga meliputi pemberia kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah, sehingga mereka dapat merencanaka proses belajar mengajar dan pengembangan sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuha masing-masing sekolah.

Oleh sebab itu, dalam rangka menyambut otonomi daerah yang sekaligus di seb otonomi penyelenggaraan pendidikan, ada sasaran utama program restrukturiasasi siste dan manajemen pendidikan di Indonesai dalam penyelenggaraan pendidikan mencaku hal-hal sebagai berikut::

Pertama, struktur organisasi pendidikan hendaknya terbuka dan dinamis, ser merencanakan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggara pendidikan, *kedua*, sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran dibakukan berdasarka prinsip edukatif sehingga lembaga pendidikan merupakan tempat menyenangkan belaja berprestasi, berkreasi, berkomunikasi dan berolahraga, serta menjalan perintah agam *ketiga*, tenaga kependidikan terutama tenaga pengajar harus direkrut melalui pros seleksi LPTK, *keempat*, struktur kurikulum pendidikan hendaknya mengacu pad penerapan system pembelajaran tidak terikat pada penyelesaian target secara seraga percaturwulan, *kelima*, proses pembelajaran tuntas diterapkan dengan berbagai modu pendekatan pembelajaran, peserta didik aktif sesuai dengan tingkat kesulitan konse konsep dasar yang dipelajari, keenam system penilaian hasil belajar secara berkelanjuta *ketujuh*, dilakukan supervisi dan akreditas, supervise bertujuan untuk pengendali mut (quality control) dan akreditas dilakukan untuk menjamin mutu (quality assurance *kedelapan*, pendidikan berbasis masyarakat.

Implikasi–implikasi tersebut menjadi suatu kewajaran dan akan berimbas pul pada system pendidikan yang ada sehingga pola system manajemen sekolah nanti jug dapat berubah serta membawah peran baru dalam dunia pendidikan. Khususnya sekola dalam menata diri kedepan. Oleh sebab itu perlu dibangun system manajemen yang seca internal bias menjadi alternatif pemecahan masalah dalam internalisasi dirinyan deng demikian sekolah dapat dikelola dengan optimal olej pesonalia yang professional da pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang lebih dekat serta tahu tentang kebutuha dan potensi sekolah.

Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara nasional tampakn mengalami banyak kesulitan, karena sejumlah masalah dan kendala yang perlu diatas Masalah-masalah yang berkaitan dengan substansi dalam penyelenggaraan pendidika adalah sebagai berikut:

a. Masalah kurikulum

Dalam konteks otnomi daerah kurikulum suatu lembaga pendidikan tidak sekeda daftar mata pelajaran yang dituntut didalam suatu jenis dan jenjang pendidikan. Dala pengertian yang luas kurikulum adalah berisi kondisi yang telah melahirkan suat rencana atau program pembelajaran tertentu, juga berkenan dengan proses yang terja dalam pembelajaran, fasilitas yang tersedia yang menunjang terjadinya proses, da akhirnya produk atau hasil proses. Oleh sebab itu masyarakat di Indonesia yang sang heterogen dengan berbagai macam kseragamannya seperti: budaya, adat, suku, sumbe daya alam dan bahkan sumber daya manusia. Masing-masing daerah mempuny kesiapan dan kemampuan yang berbeda dalam pelaksanaan desentralisasi pendidika Permasalahan relevansi pendidikan selama ini diarahkan pada kurangnya kepercayaa pemerintah pada daerah untuk menata system pendidikannya esuai dengan kondis

objektif didaerahnya. Situasi ini memacu terciptanya pengangguran lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah.

b. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah pengelolaan sumber daya manusia didaerah baik dipropinsi, kabupaten/kota memang cukup memprihatinkan. Pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) yang kekuasaanya sangat besar kadang-kadang menempatkan orang-orangnya secara semena-mena dan jarang memperhatikan aspek profesionalisme, padahal sumber daya manusia merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan, ada kekhawatiran dalam bidang kesiapan SDM antaranya belum trepenuhinya lapangan kerja dengan kemampuan sumber daya yang ada sehingga jauh pelaksanannya. Implementasi desentralisasi pendidikan masih menyimpan dalam penempatan SDMnya seperti: pengangkatan pengelolaan pendidikan yang tidak memperhatikan latar belakang dan profesionalisme, kepala dinas pendidikan yang berasal dari mantan camat, kepala dinas pasar bahkan kepala dinas pemakaman yang notabene tidak mengerti masalah pendidikan.

Kadang koordinasi lembaga agak terhambat karena tidak ada hubungan secara struktur antara lembaga yang ada ditingkat kabupaten/kota dengan provinsi. Ketika dinas pendidikan provinsi harus melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, tetapi pada waktu bersamaan dikabupaten/kota juga dilaksanakan rapat dinas dengan bupati/walikota, maka kepala dinas pendidikan biasanya lebih memilih mengikuti rapat dengan bupati/walikota yang merupakan atasnya, kutimbang mengikuti rapat koordinasi dengan dinas pendidikan propinsi. Akbiatnya hanya utusan yang mewakili kepala dinas kabupaten/kota yang hadir, dalam hal ini terkadang informasi yang diperoleh juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Fenomena ini sudah lumrah terjadi sejak dilaksanakannya otonomi daerah. Bagaimanapun penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesionalnya dan banyak tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan di dunai kerja yang ditekuninya merupakan penghambat dalam pelaksanaan system pendidikan.

c. Masalah Dana dan Sarana Prasarana Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan daerah (APBD).

Sayangnya amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum yang jelas dengan berbagai dalil dan alasan sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Persoalan anggaran pendidikan sekarang sangat menjadi sorotan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebab messkipun payung hukumnya sudah jelas, tetapi kenyataannya khususnya bagi pemerintah daerah masih terlihat ogah-ogahan untuk menganggarkan pendidikan sebesar itu dengan berbagai alasan, kendatipun mereka mengetahui bahwa pendidikan hal yang sangat penting dalam sector penganggaran pendidikan bukan merupakan prioritas yang mesti mendapat perhatian umum.

d. Masalah Bidang Sosial Budaya

Dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada dasarnya sangat diperlukan orientasi local yang bersifat kedaerahan, dalam hal ini perlu memperhatikan persoalan bidang social budaya karena adanya munculnya kesukuaan pada daerah tertentu yang ingin menujukan sebagai daerah khusus. Dalam dunia pendidikan tindakan untuk membedakan kesukuan cukup membahayakan bagi peserta didik, apabila pengaruhnya terlalu besar dan mereka menginternalisasi nilai-nilai kesukuan yang berlebihan, hal ini dapat membuat rawan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

e. Masalah Bidang Pembelajaran

Pembelajaran merupakan tugas utama di sekolah yang didalamnya terjadi proses pembelajaran, proses pelatihan, pembimbingan dan penilaian. Guru harus terpangg secara professional untuk menjalankan tugas tersebut secara integral. Dengan adany otonomi pendidikan para guru telah diberikan kebebasan untuk mengaktualisasika bidang pembelajaran tersebut secara optimal sehingga potensi-potensi peserta didik dapa berkembang sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan Sistem Pendidkan Nasional pad umumnya dan tujuan sekolah pada khususnya. Guru harus bersifat proaktif dan kreakti dalam pembelajaran dan tidak hanya menunggu perintah dan petunjuk dari atasan ataupun pemerintah. Guru harus mampu menjemput bola bukan menunggu bola untu dalam kegiatan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dalam upaya mengoptimalka hasil pembelajaran.

Hak otonomi pendidikan dalam pembelajaran, pembimbingan, pelatihan dan system penilaian yang telah diberikan kepala sekolah dalam kerangka MBS tersebut sayangnya sampai sekarang masih belum bisa berjalan secara optimal. Para guru masih banyak apatis, statis dalam menanggapi pembaharuan atau perubahan pendidikan meraka masih banyak terbelenggu pada system pembelajaran konvensional yang lebih menekankan pada pemberian informasi serta mengabaikan pada aspek afektif dan psikomotorik. Oleh sebab itu guru masih sulit dikatakan sebagai agen dan pelaku pembaharuan.

f. Masalah Komite Sekolah dan Dewan pendidikan

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Sedangkan dewan pendidik dan komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas pada butir 4 disebutkan peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya tersebut pemerintah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan, dengan tujuan ikut meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah dan dewan pendidik diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tanggal April 2002 dengan tujuan yakni sebagai berikut: (1) mewadhi dan menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dalam penyelenggaran pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dilain pihak peran yang dijalanlan komite sekolah adalah sebagai pember pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam satuan pendidikan, sebagai pendukung yang berwujud finnasial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabel, serta sebagai mediator. Tetapi dengan adanya otonomi pendidikan dalam hal ini komite sekolah dan dewan pendidikan hanya merupakan pelangkap administrasi sekolah kejelasan dari masing-masing peran komite tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Untuk itu dalam menterjemahkan kebijakan pendidikan nasional ke dalam kebijakan sekolah merupakan tugas berat para kepala dinas dan kepala sekolah di era otonomi daerah. Selain itu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan dinas pendidikan dan kebudayaan perlu menjadi acuan kepala sekolah yang menginginkan pencapaian keunggulan sekolah. Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegas dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Semua urusan pendidikan diluar kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Ini berarti tugas dan beban pemerintah daerah dalam menagani layanan pendidikan amat besar dan berat terutama bagi daerah dan kemampuan diri dan sumber daya pendidikannya kurang.

Dengan demikian otonomi daerah bidang pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga dibebankan pada lembaga pendidikan sekolah, penguruan tinggi sebagai penyelenggaran pendidikan terdepan dan dikontrol oleh stakeholder yakni orang tua, masyarakat, LSM dan sebagainya sebagai pemerhati pendidikan

Dengan berpedoman kepada sejumlah tantangan yang diuraikan diatas tentunya perlu dikaji kembali strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih memberikan harapan dimasa datang dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merespon perkembangan global pada abad ke 21 maka arah kebijakan pendidkan nasional kedepan tetap mengacu pada tiga hal yakni: (1) perluasan dan pemertaan layanan pendidkan yang bermutu, (2) peningkatan mutu pembelajaran dalam lembaga pendidikan, (3) perbaikan kapasitas dan manajemen pendidikan.

Apabila hal-hal tersebut diatas belum mendapat perhatian secara optimal, bisa dipastikan pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan menemui berbagai kendala, apalagi sekarang pimpinan daerah kabupaten/kota kekuasaannya begitu besar sehingga banyak orang mengkhawatirkan bahwa pimpinan daerah di era otonomi daerah ini bagaikan raja-raja kecil yang segala kebijakan berada ditangannya. Jadi dalam upaya membangun system pendidikan yang bagus di daerah sangat tergantung bagiamana pemahaman pimpinan daerah tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan desentralisasi pendidikan, pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memilki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan adil.
2. Pelaksanaan system pendidikan sangat memerlukan kebijakan untuk perubahan atau peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Kebijakan pendidikan dalam era otonomi daerah dapat memperbaiki implikasi penyelenggaraan pendidikan baik dibidang kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, bidang pembelajaran, serta anggaran pendidikan melalui (1) perluasan dan pemertaan layanan pendidkan yang bermutu, (2) peningkatan mutu pembelajaran dalam lembaga pendidikan, (3) perbaikan kapasitas dan manajemen pendidikan.
4. Pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional

DAFTAR PUSTAKA

Dimyati 1977. *Otonomi Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan.* Jakarta Penerbit Laras 1977

Halim Abdul 2001 *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* Yogyakarta Penerbit UPP AMP YPKN

Hanitijo Santoso 1999 *Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan* Malang:FIP UNM

Kansil Sumahatmadja 1979. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan di Daerah Indonesia* Bandung Penerbit: PT AL.Ma'arif

Mardiasmo 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* Yoyyakarta Penerbit Andi Offset

Mulyasa 2004 *Manajemen Berbasis Kompetensi. Konsep, Strategi dan Implementasi* Bandung Rosda Karya

Ndraha, 1979. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah.* Jakarta Penerbit Djambatan

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Gorontalo, 28 – 30 November 2014

ISBN 978-979-1340-81-6